

PENGEMBANGAN WILAYAH PROPINSI DIY (PENDEKATAN TEORITIS)

Rudy Badrudin

Abstract

The economic development process of Indonesia, in fact, has caused many distortions so that endanger the integration of nation. These distortions happened because of too centered-development strategy causing distortion between central and region, and between region and region as well. The greater autonomy of region is one of key policy for improving these distortions.

This circumstance, each region has to make a fit development strategy based on its endowment. This paper discusses the strategy of regional development in case of Yogyakarta Special District. Using the Central Place Model, growth Pole Theory and Location Quotient, this paper recommends Kodya Yogyakarta as a growth central. There are several sectors that have competitively economic prospect, ie: Agriculture, Building, and Construction Transportation and Communication, etc.

Seiring dengan jalannya proses reformasi di Indonesia, ancaman disintegrasi bangsa Indonesia semakin tampak di depan mata. Ancaman disintegrasi tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia selama Orde Lama dan Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah-Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang ternyata sangat berpengaruh dalam memicu dan memacu pertumbuhan *regional* (Rudy Badrudin, 1992, hal. 2). Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Menurut Mubyarto (1992, hal. 13), ada beberapa isu ketidakadilan dalam pembangunan daerah di Indonesia, yaitu:

a. Apakah adil, wilayah yang kaya sumberdaya alam tetapi penduduknya

tidak dapat menikmati kekayaan tersebut sehingga penduduknya tetap miskin.

b. Apakah adil, penduduk Jakarta seakan bergelimang uang padahal uang tersebut merupakan hasil pengusahaan sumberdaya alam di daerah di luar Jakarta yang penduduknya tetap miskin.

c. Apakah adil, seandainya penduduk yang bertempat tinggal di wilayah yang kaya sumberdaya alam tetapi hanya menikmati sendiri kekayaan tersebut tanpa membaginya dengan penduduk wilayah lain yang miskin.

Beberapa isu tersebut menunjukkan bahwa kata keadilan masih merupakan sesuatu yang sangat mahal di Indonesia dan isu-isu itulah yang sangat potensial sebagai sumber kemunculan disintegrasi bangsa. Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antar wilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi

dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah tingkat I dengan tingkat II dan antara daerah tingkat II dengan kecamatan dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada. Paper ini akan menjelaskan bagaimana mengembangkan wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan pendekatan teoritis, yaitu Model Tempat Sentral (*Central Place Model*), Teori Pertumbuhan Wilayah (*Growth Pole Theory*), dan pengamatan terhadap Koefisien Lokasi (*Location Quotient* atau LQ).

LANDASAN TEORI

Dasar pemikiran pewilayahan (*regionalisasi*) sebenarnya merupakan sesuatu yang nyata, yaitu setiap kegiatan itu pasti terjadi dan mempunyai efek dalam sebuah ruang dan bukan dalam sebuah titik yang statis (Budiono Sri Handoko, 1984, hal. 1). Misalnya, sebidang lahan yang diusahakan untuk sawah, maka kegiatan produksi padi itu tidak terbatas pada lahan itu saja, tetapi berdasarkan pemikiran bahwa tata ruang (spasial) kegiatan produksi padi itu berkaitan

dengan letak tempat tinggal petani, berapa jauh si petani harus berjalan menuju sawahnya, asal tempat petani mendapatkan input yang diperlukan, sasaran tempat petani menjual hasil produksinya, sasaran tempat petani akan membelanjakan pendapatannya, dan sebagainya.

Dengan demikian, dalam pendekatan tata ruang, pembangunan yang terjadi di suatu daerah akan mempengaruhi daerah lain, demikian pula sebaliknya. Dalam perkembangan *regional* selanjutnya, pendekatan tata ruang ini digunakan untuk membahas hubungan antara pertumbuhan daerah perkotaan dengan pedesaan. Hubungan atau kontak yang terjadi antara daerah perkotaan dengan pedesaan berserta hasil hubungannya yang berujud tertentu diartikan sebagai interaksi. (R. Bintarto., 1996, hal. 61). Interaksi antara desa-kota merupakan suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, maupun proses politik yang terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang dalam kota, dalam desa, dan di antara kota dan desa, seperti adanya kebutuhan (hubungan) timbal-balik antara desa-kota.

Secara garis besar hubungan timbal-balik antara desa-kota ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hubungan Timbal-Balik antara Desa-Kota

Kota	Desa
Pasar bagi hasil produksi pangan	Produksi pangan
Produsen input untuk industri pangan	Konsumen input
Pusat layanan kota (sekolah, rumah sakit, bank dan sebagainya)	Sumber tenaga kerja
Sumber penemuan teknologi	Pasar untuk hasil industri
Pusat kegiatan industri	Sumber investasi dalam artian teoritik

Sumber: Budiono Sri Handoko, *Interaksi antara Desa dan Kota*, PPE FE UGM dan Biro Perencanaan Deptan RI, 1985, hal. 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diinterpretasikan berbagai macam hubungan antara kegiatan-kegiatan yang berada di kota dan desa, di antaranya ada yang menyamakan hubungan antara desa dan kota dengan hubungan antara pertanian dan industri. Hubungan timbal balik itulah yang mengakibatkan munculnya fungsi kota, yaitu antara lain sebagai tempat pengumpulan hasil produksi dari daerah-daerah di belakangnya atau desa-desa di sekitarnya (*hinterland*), sebagai tempat pengumpulan input yang diperlukan pedesaan (pupuk, bibit, obat-obatan dan sebagainya) dan sebuah pusat administratif (Kadariah, 1989, hal. 67).

Kota tidak dapat tumbuh untuk "dirinya" sendiri, tetapi juga tumbuh untuk desa-desa di sekitarnya. Dalam pandangan ekonomi *regional*, pembangunan perkotaan tanpa mengkaitkan dengan pembangunan pedesaan adalah tidak mungkin terjadi, demikian pula sebaliknya. Pembangunan desa-desa (pembangunan *regional*) dalam perencanaannya menggunakan konsep *region* (wilayah). Cara yang paling banyak dikenal dalam mendefinisikan suatu *region* adalah (Syafrizal, 1983, hal. 167):

- a. Wilayah yang homogen (analisis yang bersifat makro), yaitu sebuah daerah yang memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sebuah *region* dipandang tidak penting. Misalnya, *region* penghasil padi, *region* (daerah) aliran sungai, *region* (lahan) kritis, dan sebagainya.
- b. Wilayah yang memusat (analisis yang bersifat makro) disebut juga dengan nodal, *polarized region* atau *functional region*, yaitu sebuah wilayah yang didasari oleh adanya aliran barang secara internal, kontak, dan saling tergantungnya daerah-daerah tertentu dengan suatu pusat kegiatan yang dominan (biasanya sebuah kota besar/ pelabuhan).

- c. Wilayah perencanaan (*planning region*) atau wilayah administratif (*administrative region*), yaitu wilayah yang keseragamannya didasari oleh kesamaan daerah administratif atau politis. Karena ketersediaan sarana administratifnya maka wilayah ini juga digunakan sebagai wilayah perencanaan pembangunan.

Makna pemikiran konsep *region* dalam hubungannya dengan ukuran *region-region* beserta hubungan yang terjadi di dalamnya (*intraregion*) adalah kaitannya dengan perkembangan teori lokasi. Teori lokasi pertama adalah yang dikenal sebagai proses pembentukan sistem kota. Sebagai perintis konsep ini adalah Christaller dan Losch yang kemudian dikembangkan oleh Brian Berry. Konsep ini dikenal dengan Model Tempat Sentral atau *Central Place Model* (Sukanto R. dan AR Karseno, 1997, hal. 72). Hakekat teori Christaller dan Losch adalah tanah yang produktif mendukung pusat kota. Pusat kota itu ada karena berbagai jasa penting harus disediakan bagi tanah atau lingkungan sekitarnya. Secara ideal kota merupakan pusat daerah yang produktif, dengan demikian yang disebut dengan tempat sentral pada hakekatnya adalah pusat kota. Berbagai anggapan dikemukakan oleh Christaller dan Losch, yaitu:

- a. Hanya ada dua kegiatan, yaitu kegiatan desa dan kota
- b. Kegiatan desa, yaitu pemakaian ekstensif tanah untuk pertanian dan tidak ada ekonomi aglomerasi.
- c. Kegiatan kota merupakan pemakaian intensif tanah sifatnya ekonomi aglomerasi.
- d. Mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut saling membutuhkan hasil kegiatan masing-masing.
- e. Kualitas tanah sama dan ongkos transfer proporsional dengan jarak.
- f. Kegiatan desa dan permintaan terhadap hasil kota berdistribusi yang sama.

Model Tempat Sentral (MTS) relevan bagi perencanaan kota dan *regional* karena sistem hierarkis merupakan sarana yang efisien untuk administrasi dan alokasi sumber-sumber kepada daerah. Tempat sentral merupakan titik pertumbuhan inti di daerahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi keseluruhan daerah. Dengan demikian, jelas bahwa distribusi ruang dan besar dari pusat-pusat kota merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur daerah-daerah nodal dan melahirkan konsep-konsep dominasi dan polarisasi yang mensifati struktur ini. Dalam MTS juga dikemukakan tentang interdependensi antara pusat-pusat kota dengan daerah-daerah di sekitarnya.

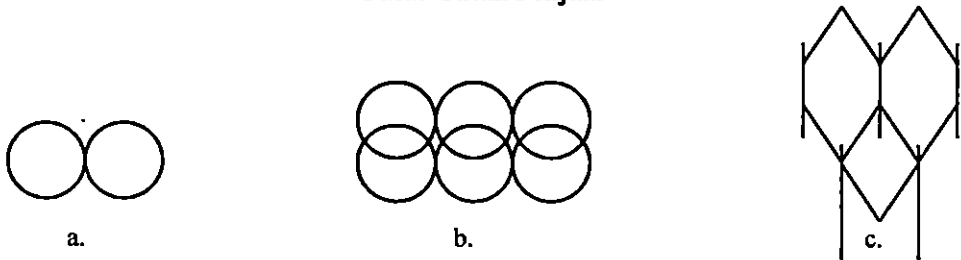
Konsep MTS pada hakekatnya didasarkan pada dua faktor lokasi, yaitu ongkos transfer dan aglomerasi ekonomi. Seorang penjual yang melayani langganannya akan mempunyai daerah penjualan yang berbentuk lingkaran dan dibatasi oleh ongkos transfer barang yang dijual (Gambar 1a). Dengan adanya berbagai penjual yang mempunyai langganan sendiri maka bentuk pasar kemudian seperti pada Gambar 1b, yaitu daerah pasar pusat kota akan saling me-

nyentuh. Pengusaha-pengusaha akan masuk ke pasar selama di pasar terdapat keuntungan, sehingga dalam jangka panjang akan tercapai keseimbangan. Hal ini terjadi apabila daerah tersebut dibatasi oleh poligon yang sama yang berbentuk segitiga, segi empat, maupaun *hexagonal*. Dari berbagai bentuk poligon tersebut ternyata bentuk *hexagonal* yang paling efisien karena rata-rata jarak antara penjual dengan pembeli minimum dan daerahnyapun semua tercakup tidak ada daerah yang kosong seperti Gambar 1c. Berdasarkan prinsip aglomerasi ekonomi maka ekonomi kota besar menjadi pusat daerahnya sendiri dan pusat kegiatan kota yang lebih kecil.

Secara teoritis aglomerasi ekonomi dibedakan menjadi empat hal, yaitu (Kadariah, 1989, 60):

- Ekonomi skala internal (*internal economies of scale*), yaitu semakin ekonomisnya operasi sebuah perusahaan karena semakin besarnya perusahaan itu, sehingga biaya per satuan output dalam jangka panjang akan semakin menurun.

Gambar 1
Pasar Untuk Penjual



Sumber: Sukanto R. dan AR Karseno, *Ekonomi Perkotaan*, BPFE, ed. 3, Yogyakarta, 1997, hal. 73.

- b. Ekonomi eksternal (*external economies* atau *lokalization economies*), yaitu semakin ekonomisnya operasi sebuah industri karena terletak pada lokasi yang sama dengan industri sejenis, sehingga bersama-sama dapat memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan kota.
- c. Ekonomi karena letaknya yang berhubungan dengan daerah perkotaan (*urbanization economies* atau *economies of urban concentration*), yaitu sifat ekonomis yang dapat dinikmati oleh industri tertentu karena terletak pada suatu lokasi yang kegiatan ekonomisnya secara keseluruhan berskala besar.
- d. Ekonomi karena penghematan biaya pengangkutan, yaitu sifat ekonomis yang disebabkan penghematan biaya pengangkutan yang didapat oleh beberapa buah pabrik yang sebagai keseluruhan merupakan suatu kompleks industri (*industrial complex*).

Teori lokasi kedua adalah yang disebut dengan "kutub-kutub pertumbuhan" (*growth poles*) yang dipelopori oleh ekonom-ekonom Perancis, yaitu Francois Perroux dan Boudeville (Alonso W., 1989, hal. 334). Perroux dan Boudeville mendefinisikan sebuah kutub pertumbuhan sebagai suatu kumpulan industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan kemuka (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat dengan sebuah industri unggul (*leading industry*). Perroux dan Boudeville mengatakan, bahwa kumpulan industri cenderung untuk memilih lokasi yang memusat pada kota-kota besar (aglomerasi ekonomi) dan didukung oleh sebuah daerah belakang (*hinterland*) yang kuat karena berlakunya aglomerasi ekonomi.

Pendekatan *growth poles* menekankan pentingnya pusat-pusat wilayah

utama untuk pertumbuhan dengan maksud agar pertumbuhan tersebut dapat menimbulkan efek pertumbuhan bagi daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, pendekatan *growth poles* dapat digunakan untuk mengkaji hubungan timbal balik desa-kota, yaitu dengan mengembangkan kota melalui pengembangan sektor industri dengan tujuan agar perkembangan ini menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dan menyebar (*spread effect*) ke perkembangan desa melalui arus barang hasil industri ke desa, arus bahan mentah untuk industri dan bahan pangan dari desa, arus urbanisasi atau "commuter" ke kota dan mungkin juga arus modal dari desa ke kota. Makin murah biaya produksi industri di kota dan atau makin rendah biaya transpor dari kota ke desa maka makin luas pengaruh perkembangan kota ke desa.

Dalam kenyataannya, perkembangan kota mengakibatkan terjadinya polarisasi ("*polarization*" atau "*backwash effect*") terhadap perkembangan desa, karena adanya urbanisasi tenaga kerja muda ke kota sehingga desa kehilangan tenaga produktif untuk mengembangkan desa itu sendiri. Untuk menandingi polarisasi maka John Friedmann dan Mike Douglass mengajukan pendekatan spasial yang disebut *agropolitan approach* (J. Kardi, 1993, hal. 156). Pendekatan agropolitan menyarankan agar pola pertumbuhan sebagai berikut:

- a. wilayah pertumbuhan yang secara geografis relatif sempit (untuk Indonesia luasnya lebih kurang satu kecamatan),
- b. ada kemandirian dalam perencanaan pembangunan wilayahnya,
- c. ada diversifikasi dalam *employment* antara pertanian dan non pertanian,
- d. ada potensi pengembangan industri yang didasarkan pada sumberdaya yang terdapat di wilayah tersebut, dan
- e. pendayagunaan teknologi lokal.

Model polarisasi spasial ekonomi lain adalah model yang ditemukan Albert Hirschman dan Gunnar Myrdal. Hirschman dan Myrdal berpendapat, bahwa karena potensi sumberdaya yang tidak seragam dan tidak merata antara *region* satu dengan *region* lainnya maka *region-region* dalam sebuah negara akan tumbuh secara tidak bersama-sama dan tidak seragam. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan *regional* yang mempunyai potensi paling kuat. Apabila *region-region* kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi *region-region* lemah. Perembetan pertumbuhan ini bisa berdampak positif (*trickle-down effect*), yaitu adanya pertumbuhan di *region* yang kuat dan menyerap potensi tenaga kerja di *region* yang lemah yang masih menganggur atau mungkin *region* yang lemah menghasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk *region* yang lebih kuat. Sedangkan dampak negatif (*polarization effect*) terjadi kalau kegiatan produksi di *region* yang kuat bersifat kompetitif dengan produksi *region* yang lemah, yang sebenarnya justru memerlukan pembinaan dan tidak bersaing dengan *region* kuat yang memang memiliki sifat-sifat ekonomis yang lebih tangguh.

Pandangan ini didukung oleh hipotesis Kuznets dan hasil penelitian Williamson dan El Shaks. Kuznets menemukan bahwa pada tahap-tahap permulaan pertumbuhan suatu negara terdapat pembagian pendapatan yang cenderung semakin tidak merata, tetapi dengan semakin tumbuhnya negara itu maka pembagian pendapatannya akan semakin merata. Sedangkan hasil penelitian Williamson dan El Shaks disimpulkan, bahwa ketidakmerataan *regional* jika digambarkan dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi akan menghasilkan kurva berbentuk lonceng yang beberapa titik

puncaknya dicapai pada saat peralihan dari tahap lepas-landas menuju tahap pendewasaan.

PENGEMBANGAN PROPINSI DIY DENGAN MENGGUNAKAN TEORI LOKASI

Hakekat teori MTS adalah memandang pusat kota sebagai tempat sentral bagi titik pertumbuhan inti di daerahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi keseluruhan daerah. Dengan demikian, dalam teori MTS terjadi interdependensi antara pusat-pusat kota dengan daerah-daerah di sekitarnya. Propinsi DIY dengan 4 kabupaten dan 1 kotamadya mempunyai pusat pemerintahan di kota Yogyakarta yang terletak di kotamadya Yogyakarta. Oleh karena itu, apabila pengembangan propinsi DIY didekati dengan menggunakan teori MTS maka akan memandang kotamadya Yogyakarta sebagai pusat kota - titik pertumbuhan inti- dan 4 kabupaten di propinsi DIY sebagai daerah pedesaan.

Berdasarkan prinsip aglomerasi ekonomi maka ekonomi kota Yogyakarta - kotamadya Yogyakarta- menjadi pusat daerahnya sendiri dan pusat kegiatan kota yang lebih kecil -kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman. Aglomerasi ekonomi yang muncul di propinsi DIY dapat berupa ekonomi skala internal, ekonomi skala eksternal, ekonomi karena letaknya yang berhubungan dengan daerah perkotaan, dan ekonomi karena penghematan biaya pengangkutan.

Mengembangkan propinsi DIY dengan menggunakan teori pusat pertumbuhan adalah menekankan pentingnya pusat-pusat wilayah utama -kotamadya Yogyakarta- untuk pertumbuhan dengan maksud agar pertumbuhan tersebut dapat menimbulkan efek pertumbuhan bagi daerah-daerah lainnya - kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman. Di samping itu, pendekatan *growth poles* dapat digunakan untuk mengkaji

hubungan timbal balik kotamadya Yogyakarta dengan kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman yaitu dengan mengembangkan kotamadya Yogyakarta melalui pengembangan sektor industri dengan tujuan agar perkembangan ini menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dan menyebar (*spread effect*) ke perkembangan 4 kabupaten melalui arus barang hasil industri ke 4 kabupaten, arus bahan mentah untuk industri dan bahan pangan dari 4 kabupaten, arus urbanisasi atau "*commuter*" ke kotamadya Yogyakarta, dan mungkin juga arus modal dari 4 kabupaten ke kotamadya Yogyakarta.

Pengembangan propinsi DIY dengan pendekatan pusat pertumbuhan tepat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan antarwilayah karena adanya potensi sumberdaya yang tidak merata antarwilayah di propinsi DIY. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, propinsi DIY perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan wilayah di kotamadya atau kabupaten yang mempunyai potensi paling kuat. Apabila wilayah-wilayah kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi wilayah-wilayah lemah.

Untuk mencari wilayah di propinsi DIY yang berpotensi kuat dalam pertumbuhannya digunakan model gravitasi dan interaksi dalam ruang. Model ini menggunakan dasar hukum Sir Isaac Newton tentang gravitasi yang menyatakan bahwa dua benda akan saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara kedua benda tersebut.

Penggunaan model gravitasi dan interaksi dalam ruang dapat diberikan contoh sebagai berikut, misalnya terdapat dua wilayah -wilayah 1 dan 2- yang dipisahkan jarak tertentu, maka interaksi dalam ruang dua wilayah tersebut digambarkan dalam bentuk formulasi sebagai berikut

(Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1992, hal. 80):

$$I_{1,2} = a (P_1 P_2) / J^b_{1,2}$$

yang menunjukkan bahwa:

$I_{1,2}$: interaksi dalam ruang antara wilayah 1 dan 2

P_1 : jumlah penduduk wilayah 1

P_2 : jumlah penduduk wilayah 2

$J^b_{1,2}$: jarak antara wilayah 1 dan 2

a : konstante empirik yang besarnya 1

b : konstante jarak yang besarnya 2

Menurut Suwarjoko Warpani (1994, hal. 114), pengembangan model gravitasi dan interaksi dalam ruang dalam analisis *regional* adalah:

$$I_{1,2} = a (w_1 P_1) (w_2 P_2) / J^b_{1,2}$$

yang menunjukkan bahwa:

$I_{1,2}$: interaksi dalam ruang antara wilayah 1 dan 2

w_1 : pendapatan per kapita wilayah 1

w_2 : pendapatan per kapita wilayah 2

P_1 : jumlah penduduk wilayah 1

P_2 : jumlah penduduk wilayah 2

$J^b_{1,2}$: jarak antara wilayah 1 dan 2

a : konstante empirik yang besarnya 1

b : konstante jarak yang besarnya 2

Nilai $I_{1,2}$ menunjukkan eratnya hubungan antara wilayah 1 dan 2. Semakin besar nilai $I_{1,2}$ maka semakin erat hubungannya dan dengan demikian semakin banyak pula perjalanan ekonomi yang terjadi sebagai konsekuensi interaksi kota-desa dalam analisis ekonomi *regional*. Hasil perhitungan nilai $I_{1,2}$ menunjukkan bahwa interaksi kota-desa yang paling erat adalah antara kotamadya Yogyakarta dengan kabupaten Sleman dan nilainya makin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, daerah (desa) yang berpotensi

kuat untuk dikembangkan adalah kotamadya Yogyakarta sebagai pusat dengan kabupaten Sleman sebagai desa tanpa mengabaikan potensi yang terdapat dalam interaksi kota-desa antara kotamadya Yogyakarta dengan kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Perhitungan nilai $I_{1,2}$ ditunjukkan dalam Tabel 2.

Untuk mengetahui potensi yang terdapat di pusat pertumbuhan wilayah (kota) dan daerah-daerah lainnya yang diharapkan dapat ditarik pertumbuhannya dapat digunakan metode lain, yaitu melalui pengamatan terhadap nilai LQ sektoral wi-

layah. Perhitungan nilai LQ menggunakan rumus sebagai berikut (Paul Sitohang, 1991, hal. 15):

$$LQ = \frac{X_i^r / X^r}{X_i^n / X^n}$$

yang menunjukkan bahwa:

LQ : nilai *location quotient*

X : variabel yang diamati

r : daerah tingkat II

i : sektor

n : daerah tingkat I

Tabel 2
Indeks *Gravity* dan Interaksi Dalam Ruang Propinsi DIY, Tahun 1991-1996

Tahun	Yogyakarta Sleman	Yogyakarta Bantul	Yogyakarta Gunungkidul	Yogyakarta Kulon Progo
1991	1.568,1	932,2	103,8	103,2
1992	2.197,9	1.272,8	123,8	132,1
1993	2.980,7	1.768,2	169,5	166,8
1994	3.980,7	2.372,0	224,2	204,6
1995	3.904,2	3.239,2	301,6	254,5
1996	6.935,3	4.422,6	405,7	316,4

Sumber: Biro Pusat Statistik. *Propinsi DIY Dalam Angka Tahun 1997*. Data diolah.

Tabel 3
Hasil Perhitungan LQ Wilayah DIY Tahun 1996

Sektor	Nilai LQ
Pertanian	1,14
Pertambangan dan Penggalian	0,07
Industri	0,62
Listrik, Gas, dan Air Minum	0,67
Bangunan dan Konstruksi	1,33
Perdagangan	0,94
Transportasi dan Komunikasi	1,16
Bank dan Lembaga Keuangan	0,71
Sewa Rumah	1,35
Pemerintahan	1,38
Jasa-jasa	2,23

Sumber: Biro Pusat Statistik. *Indonesia Dalam Angka Tahun 1997*. Data diolah.

Perhitungan dalam LQ adalah dengan membandingkan produk domestik *regional* bruto (PDRB) suatu wilayah (daerah tingkat II) dengan sumbangan sektor tersebut secara keseluruhan terhadap pembentukan PDRB dari wilayah yang lebih luas (daerah tingkat I). Apabila nilai LQ lebih besar daripada 1, maka wilayah yang bersangkutan berpotensi untuk mengembangkan sektor yang diamati.

Hasil perhitungan LQ tahun 1996 untuk wilayah DIY dengan menggunakan data PDRB tahun 1997 menunjukkan bahwa wilayah DIY mempunyai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu sektor pertanian, bangunan dan konstruksi, transportasi dan komunikasi, sewa rumah, pemerintahan, dan jasa-saja lainnya. Tabel hasil perhitungan LQ tahun 1996 ditunjukkan pada Tabel 3. Dengan cara yang sama, perhitungan nilai LQ untuk wilayah (daerah) tingkat II di propinsi DIY dapat dilakukan dengan memandang data sektor yang diamati pada PDRB tingkat I untuk wilayah yang lebih luas (angka penyebut dalam rumus LQ) dan PDRB tingkat II untuk wilayah yang lebih sempit (angka pembilang dalam rumus LQ). Nilai LQ yang dihasilkan akan menunjukkan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di kotamadya Yogyakarta, kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman.

SIMPULAN

Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia semakin tampak di depan mata karena proses pembangunan di Indonesia selama Orde Lama dan Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah -Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang ternyata sangat

berpengaruh dalam memicu dan memacu pertumbuhan *regional*. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah tingkat I dengan tingkat II dan antara daerah tingkat II dengan kecamatan dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada. Pengembangan wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan pendekatan teoritis dapat dilakukan dengan Model Tempat Sentral (*Central Place Model*), teori pertumbuhan wilayah (*Growth Pole Theory*), dan pengamatan terhadap koefisien lokasi (*Location Quotient* atau LQ).

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *index gravity* dan interaksi ternyata kota-desa yang paling erat adalah antara Kotamadya Yogyakarta dengan kabupaten Sleman. Dengan demikian Kotamadya Yogyakarta berpotensi dikembangkan menjadi pusat dengan Sleman sebagai desa, tanpa mengesampingkan daerah-daerah lain. Sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain sektor pertanian, bangunan dan konstruksi, transportasi dan komunikasi, sewa rumah, pemerintah, dan jasa-jasa lainnya. Pembangunan ini didasarkan atas hasil penghitungan LQ dengan menggunakan data PDRB tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso W. (1989), "Ketidakseimbangan Kota dan Daerah", *Ekonomi Keuangan Indonesia*. Vol. XXVII. No. 3. Jakarta. September.
- Badrudin, Rudy. (1997), "Alokasi Investasi Antarwilayah di Indonesia", *Makalah Seminar*. BPPM STIE YKPN.
- Batubara, Januar. (1997), "Masalah Angkutan Kota (Pengamatan Salah Satu Aspek Angkutan Bus Kota di DKI Jaya)". *Widyapura*. No. 2. Tahun I. Jakarta. Januari.
- Bintarto, R. (1996), "Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya", *Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Bintarto, R. dan Surastopo Hadiumarno. (1992), *Metode Analisa Geografi*. LP3ES. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik.(1997), *Indonesia Dalam Angka Tahun 1997*, Jakarta.
- _____, (1997), *Propinsi DIY Dalam Angka Tahun 1997*, Jakarta.
- Edward, Morlok K. (1995), *Pengantar Perencanaan dan Teknik Transportasi*, Erlangga, Jakarta.
- Handoko, Budiono Sri. (1984), *Pembangunan Regional*, PPE FE UGM dan Deptan RI, Yogyakarta.
- _____, (1985), *Interaksi antara Desa dan Kota*, PPE FE UGM dan Deptan RI, Yogyakarta.
- Kadariah, (1989), *Ekonomi Perencanaan*, Jakarta, LP FE UI.
- Ibrahim, A. Madjid. (1996), "Pendekatan Regional dalam Pembangunan Nasional", *Prisma*, No. 3. Tahun V. Jakarta. April.
- Poerwadarminta, WJS. (1996). "Kamus Umum Bahasa Indonesia", *Balai Pustaka*, Jakarta.
- Sardi, J. (1993), "Peranan Kota Kecil dalam Pengembangan Pedesaan", *Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. XXXI. No. 2, Jakarta, Juni.
- Sitohang, Paul. (1991), *Dasar-dasar Ilmu Regional*. LPFE-UI. Jakarta.
- Soekotjo, R. (1994), "Beberapa Masalah Angkutan Kota (Suatu Kasus Transportasi di Kota Padat Penduduk)", *Prisma*, No. 2. Tahun III, Jakarta, April.
- Sukanto R. dan AR Karseno, (1997), *Ekonomi Perkotaan*. Ed. 3. BPFE, Yogyakarta.

Syafrizal. (1993), "Ekonomi Regional: Suatu Perkembangan Dalam Ilmu Ekonomi",
Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol. XXXI. No. 2, Jakarta, Juni.

Warpani, Suwarjoko. (1994), *Analisis Kota dan Daerah*. Penerbit ITB. Bandung.